

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Diera globalisasi saat ini, Indonesia dihadapkan oleh berbagai persaingan utamanya dalam bidang ekonomi. Hal tersebut juga mempengaruhi dunia bisnis yang sekarang semakin berkembang pesat. Berbagai usaha telah bermunculan baik itu usaha berskala kecil maupun besar. Untuk menjaga perkembangan dan kelangsungan hidup suatu usaha perlu adanya upaya yang harus dilakukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Salah satunya yaitu manajemen perusahaan yang harus dapat menyusun rencana untuk perusahaan menjadi yang lebih baik dari periode-periode sebelumnya dengan memperbaiki sistem pengawasan dan menentukan kebijakan-kebijakan yang tepat. Manajemen dalam melakukan pengolahan terhadap perusahaan harus dapat mengukur kemampuan perusahaan dengan memperbaiki kondisi keuangan dalam hal efektivitas dan efisiensi demi mencapai keberhasilan perusahaan untuk memenuhi kewajiban dan meningkatkan kinerja perusahaan.

Kemampuan perusahaan dalam menghadapi persaingan baik usaha milik pemerintah maupun swasta dapat ditentukan melalui baik atau tidaknya kondisi suatu usaha. Salah satu cara untuk mengetahui kondisi suatu perusahaan dapat dilihat melalui laporan keuangannya yang dipengaruhi oleh kinerja manajemen sehingga perlu untuk melakukan penilaian terhadap kinerja keuangan perusahaan. Yang dapat digunakan dalam penilaian kinerja

keuangan yaitu atas dasar laporan keuangan yang telah disusun. Laporan keuangan ini berisikan informasi mengenai laporan operasional berupa keuangan perusahaan. Laporan keuangan merupakan alat yang penting untuk memperoleh informasi sehubungan dengan kondisi keuangan dikarenakan laporan keuangan dapat memberikan informasi-informasi mengenai posisi keuangan suatu perusahaan sehingga dapat digunakan sebagai media untuk mengukur kinerja keuangan dan memberikan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan sebagai pertimbangan dalam pembuatan keputusan-keputusan ekonomi. Kasmir (2017:7) mengatakan bahwa laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada tanggal dan periode tertentu yang biasanya dibuat per periode baik itu tiga bulan atau enam bulan untuk kepentingan internal perusahaan. Menurut PSAK 1 (2017) yang dikeluarkan oleh IAI menyatakan bahwa suatu perusahaan diwajibkan untuk membuat laporan keuangan yang terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Oleh karena itu, untuk mengetahui kondisi dan kinerja keuangan yang akan dicapai oleh suatu perusahaan maka perlu adanya analisis keuangan yang tepat. Analisis tersebut dapat dilakukan dengan menghitung atau menganalisis atas laporan keuangan tersebut dengan menggunakan rasio keuangan.

Rasio keuangan adalah salah satu jenis alat ukur yang digunakan perusahaan untuk menganalisis laporan keuangan. Dengan menggunakan rasio keuangan dapat menganalisa baik atau buruknya keadaan posisi

keuangan suatu perusahaan dari suatu periode ke periode berikutnya. Harahap (2009:297) mengungkapkan bahwa rasio keuangan merupakan angka yang diperoleh dari suatu akun laporan keuangan dengan akun lainnya yang mempunyai hubungan yang relevan dan signifikan. Rasio keuangan memiliki peranan dan fungsi yang penting dalam menjalankan suatu bisnis atau usaha yakni untuk dapat mengetahui kinerja perusahaan dan membantu manajemen melakukan perencanaan di masa yang akan mendatang sehingga keputusan yang dibuat tepat. Rasio yang digunakan dalam pengukuran kinerja keuangan adalah rasio likuiditas, rasio solvabilitas dan rasio profitabilitas.

Menurut Syafrida (2015:121), menyatakan bahwa rasio likuiditas merupakan kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban keuangan yang segera dapat dicairkan atau yang sudah jatuh tempo. Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Yudiarto dan Nur (2015) dari pengukuran rasio likuiditas pada Koperasi Manunggal Universitas Kadari hasil analisisnya yaitu dalam memenuhi utang jangka pendeknya obyek tersebut menunjukkan kondisi kurang baik dikarenakan koperasi tersebut hanya menjalankan usaha simpan pinjam sehingga tidak mempunyai persediaan dan untuk surat berharga atau bank nilainya kosong dikarenakan dana terserap untuk pinjaman anggota.

Menurut Kasmir (2017:151), berpendapat bahwa rasio solvabilitas atau *leverage ratio* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Riswan dan Yolanda (2014) dari hasil analisis

pengukuran rasio solvabilitas yang terdapat di PT. Budi Satria Wahana Motor mencerminkan bahwa hutang-hutangnya dijamin dengan total aktiva yang tersedia, namun besar jumlah hutang tidak sebanding dengan besarnya modal sendiri sehingga pendapatan yang dihasilkan lebih banyak untuk mengembalikan biaya pinjaman daripada untuk intern.

Menurut Kasmir (2017:196) berpendapat bahwa rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sulis dan Asrofi (2017) dari hasil analisis pengukuran rasio profitabilitas pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tegal dalam aspek keuangan sudah memiliki kinerja yang baik dalam kemampuannya menghasilkan laba dari jumlah aktiva lancar maupun aktiva produktif yang ada. Hal tersebut dapat menjadi motivasi bagi perusahaan agar kedepannya dapat mempertahankan kinerja yang ada bila perlu agar nilai yang didapat sekarang bisa lebih baik lagi sehingga perusahaan harus memaksimalkan aktiva-aktiva yang ada terutama aktiva produktif yang menjadi salah satu faktor penunjang aktivitas operasional perusahaan agar dapat berjalan dengan lancar dan perusahaan memperoleh laba yang lebih besar dari sebelumnya.

Dalam menghadapi era persaingan yang semakin ketat perusahaan sangat perlu didukung dengan adanya sumber daya manusia yang mumpuni untuk peningkatan kinerja yang optimal. Dengan memberikan kesejahteraan bagi para pekerja atau buruh untuk menciptakan ketenangan bekerja dan kenyamanan atau ketentraman usaha perusahaan sehingga akan terwujud

hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan serta bermartabat.

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diamanatkan bahwa tujuan negara adalah untuk keadilan sosial dan meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia. Dalam perubahan keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tujuan tersebut semakin dipertegas yaitu dengan mengembangkan sistem jaminan sosial bagi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Pemerintah dalam peran pentingnya berusaha untuk dapat menjalankan amanat dan tugasnya dengan baik dan sebesar-sebesarnya untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Salah satunya dengan mewajibkan kepada seluruh perusahaan untuk mengikuti program jaminan sosial. Dalam melaksanakannya harus ada kesinambungan antara perusahaan dengan pihak pemerintah demi berlangsungnya kelancaran sistem jaminan yang mendukung ketenangan dalam kehidupan masyarakat.

Sistem jaminan sosial nasional merupakan program negara yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat dan mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan dan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup layak bagi setiap pekerja dan anggota keluarganya. Diamanatkan dalam Undang-Undang No.40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang kemudian ditindaklanjuti dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang badan penyelenggara jaminan sosial, pemerintah mewajibkan kepada seluruh

perusahaan atau pemberi kerja untuk dapat mengikut sertakan pekerja atau buruhnya sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial terbentuk atas dua BPJS yaitu, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Pada penelitian ini, peneliti terfokus untuk melakukan penelitian di BPJS Ketenagakerjaan.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan merupakan program pemerintah yang sejak periode 1 Januari 2014 ditetapkan sebagai pengganti PT Jamsostek (persero). Dengan tujuan yang sama yaitu memberikan perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi resiko sosial ekonomi tertentu dan penyelenggaraannya menggunakan mekanisme peningkatan kesejahteraan sosial. BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. BPJS Ketenagakerjaan juga merupakan suatu organisasi yang pada umumnya memiliki tujuan tertentu yang ingin dicapai untuk dapat memenuhi kepentingan para anggotanya. Tujuan tersebut dapat dikatakan sebagai prestasi yang hendak dicapai oleh pihak manajemen suatu perusahaan. Salah satu cara untuk dapat menilai prestasi atau kinerja suatu perusahaan dapat dilakukan dengan penilaian terhadap kinerja keuangan sehingga pihak internal maupun eksternal perusahaan dapat menggunakannya sebagai dasar dalam pengambilan keputusan.

Kinerja keuangan perusahaan merupakan suatu gambaran tentang kondisi keuangan suatu perusahaan yang dianalisis dengan menggunakan alat-alat analisis keuangan, sehingga dapat diketahui mengenai baik buruknya keadaan keuangan suatu perusahaan yang mencerminkan prestasi kerja dalam periode tertentu. Menurut Rudianto (2013:189) kinerja keuangan merupakan hasil atau prestasi yang telah dicapai oleh pihak manajemen perusahaan dalam menjalankan fungsinya mengelola aset perusahaan secara efektif selama periode tertentu. Kinerja keuangan sangat dibutuhkan oleh perusahaan untuk mengetahui dan mengevaluasi sampai dimana tingkat keberhasilan perusahaan berdasarkan aktivitas keuangan yang telah dilaksanakan.

Penilaian kinerja keuangan memiliki peran penting dalam memberikan informasi mengenai keadaan yang sedang dialami oleh suatu perusahaan. Terlebih lagi demi mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Pada BPJS Ketenagakerjaan yang merupakan program pemerintah hendaklah tetap terus melakukan perbaikan untuk perkembangan program jaminan dan sebesar-sebasarnya untuk kepentingan pesertanya. Transformasi yang dilakukan dari Jamsostek menjadi BPJS Ketenagakerjaan haruslah memberikan kesejahteraan yang lebih baik lagi.

Pada kenyataannya program jaminan sosial yang mewajibkan kepada seluruh perusahaan atau pemberi kerja mendaftarkan para pekerja atau buruhnya namun tidak semua perusahaan atau pemberi kerja melaksanakan peraturan tersebut. Alasannya perusahaan merupakan suatu badan usaha yang menginginkan mengeluarkan biaya sekecil-kecilnya dan mendapatkan

keuntungan sebesar-besarnya. Dengan mencari alternatif lain untuk pendaftaran jaminan sosial untuk para pekerjanya yang relatif dinilai lebih rendah dibanding dengan tarif iuran yang terdapat di BPJS Ketenagakerjaan. Sehingga para pengusaha memilih mendaftarkan sebagian pekerja atau buruhnya dalam program jaminan sosial yang diwajibkan oleh pemerintah tersebut.

Melihat fenomena diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap penilaian kinerja keuangan yang terdapat di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dengan menggunakan rasio likuiditas, solvabilitas dan profitabilitas. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kondisi keuangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan berdasarkan rasio likuiditas, solvabilitas dan profitabilitas terhadap kinerja keuangan dari setiap periode.

Tabel 1.1 : Hasil Analisis Rasio Keuangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan

No.	Analisis Rasio	Tahun		
		2014	2015	2016
1.	Rasio Likuiditas			
	a. Rasio Lancar	783,25%	800,12%	553,08%
	b. Rasio Cepat	526,93%	467,94%	354,50%
	c. Rasio Kas	136,64%	136,25%	118,37%
2.	Rasio Solvabilitas			
	a. Debt to Asset Ratio	19,96%	19,56%	19,75%
	b. Debt to Equity Ratio	24,93%	24,32%	24,62%
3.	Rasio Profitabilitas			
	a. ROI	6,16%	5,64%	9,45%
	b. ROE	7,69%	7,01%	11,77%

Sumber : Peneliti (2018)

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dari tahun 2014 – 2016 rasio likuiditasnya

cenderung mengalami penurunan, ini menggambarkan bahwa kemampuan perusahaan dalam menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya cenderung menurun. Sedangkan rasio solvabilitas dan rasio profitabilitas terlihat berfluktuasi namun cenderung stabil. Oleh karena itu, BPJS Ketenagakerjaan perlu adanya analisa laporan keuangan dengan membandingkan akun yang terdapat dalam laporan keuangan khususnya laporan laba-rugi dan neraca untuk 3 (tiga) periode akuntansi dengan menggunakan teknik analisis rasio. Dari hasil analisis tersebut diharapkan dapat dijadikan tolak ukur kinerja keuangan perusahaan dan untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan serta dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam mengambil keputusan.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Analisis Laporan Keuangan Berdasarkan Rasio Likuiditas, Solvabilitas dan Profitabilitas Terhadap Kinerja Keuangan pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti dapat mengambil suatu rumusan masalah yaitu:

Bagaimana hasil analisis laporan keuangan berdasarkan rasio likuiditas, solvabilitas dan profitabilitas terhadap kinerja keuangan pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja keuangan dilihat dari hasil analisis laporan keuangan berdasarkan rasio likuiditas, solvabilitas dan profitabilitas pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka manfaat penelitian adalah sebagai berikut :

1. Manfaat bagi penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai analisis laporan keuangan dan penilaian kinerja keuangan perusahaan.

2. Manfaat bagi akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan perkembangan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi khususnya mengenai pengukuran kinerja keuangan perusahaan melalui rasio keuangan.

3. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam merumuskan kebijakan serta tindakan-tindakan selanjutnya sehubungan dengan penggunaan analisis laporan keuangan.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam pembahasan hasil penelitian, maka sistematika penulisan penelitian ini secara garis besar sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang landasan teori yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain : penelitian terdahulu, landasan teori, kerangka konseptual, *research question*, dan model analisis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan perihal kerangka proses berpikir, pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, batasan dan asumsi penelitian, unit analisis, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan deskripsi obyek penelitian, hasil analisis dan interpretasi.

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bagian akhir dari penulisan penelitian yang mengemukakan tentang simpulan dan saran.